

**KINERJA INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Adnan Rahmat Kasogi
Drs. Zulkarnaen Ilyas., BA, MM
Hj. Nunung Munawaroh., S.Ag, M.Si**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl.Ir.Soekarno Km. 20 Telp. (022) 7798252, Fax. (022) 7798256, Kode Pos 45363
JATINANGOR – SUMEDANG
e-mail : 28.0072@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

In this study the authors took the title "Performance of the Regional Inspectorate in Government Supervision in South Tapanuli Regency, North Sumatra Province". This study aims to obtain a description of the performance of the Regional Inspectorate in Government Supervision in South Tapanuli Regency, North Sumatra Province, the factors that hinder the performance of the regional inspectorate in government supervision, and efforts to overcome the inhibiting factors for the performance of the regional inspectorate in government supervision. This study uses a descriptive design with an inductive approach where the research informants consist of government elements. Collecting data using observation, interview, and documentation techniques. The data obtained were analyzed and presented with the stages of data reduction, data presentation/verification and drawing conclusions. Data analysis uses the performance theory proposed by Wibowo (2014). The results obtained from this study indicate that the performance condition of the regional inspectorate is quite good, but there are still several obstacles that need to be overcome, among others, the limitations of human resources and available facilities as well as the breadth of inspection objects supervised by the South Tapanuli Regency Inspectorate. Efforts made by the Inspectorate are increasing the number of human resources according to needs, conducting training and procurement and facilities and infrastructure.

Keywords: Performance, Supervision, Government

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Kinerja Inspektorat daerah dalam Pengawasan Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang Kinerja dari Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, faktor yang menghambat Kinerja Inspektorat daerah dalam pengawasan pemerintahan, dan upaya untuk mengatasi faktor

penghambat Kinerja Inspektorat daerah dalam pengawasan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan induktif dimana informan penelitian terdiri dari unsur pemerintahan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dengan tahapan reduksi data, penyajian data/verifikasi dan penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Wibowo (2014). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan kondisi kinerja Inspektorat daerah sudah cukup baik ,tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang perlu untuk diatasi antara lain, keterbatasan SDM serta sarana yang tersedia dan juga luasnya obyek pemeriksaan yang diawasi oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan. Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan, melakukan diklat serta pengadaan dan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Kinerja, Pengawasan, Pemerintahan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.508 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Pulau Rote. Wilayah yang luas ini menyebabkan, Negara Republik Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian di jelaskan dan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya pengalihan kekuasaan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat.. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan peluang terbesar untuk menata pemerintahannya sendiri. Untuk itu, otonomi diberikan kepada daerah otonom oleh pemerintah pusat.

Untuk dapat mengelola pemerintahan yang baik dan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan yang baik agar tidak ada peluang terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan pada saat pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya. Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan pengawasan profesional dari regulator dalam menjalankan fungsinya, terutama

dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, agar dapat mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah daerah dalam fungsi pengawasan dibantu oleh aparat pengawas yang disebut inspektorat. Inspektorat merupakan instansi pengawasan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dikepalai oleh inspektur, yang ketika menjalankan tugasnya, pengawas akan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah melalui sekretaris daerah. Dalam rangka mengembangkan dan memelihara efektifitas manajemen risiko dan prosedur pemerintah, auditor internal harus meningkatkan kualitas kinerja aparatur untuk menghindari kegagalan instansi. Pengawasan yang ideal akan terwujud apabila aparat tersebut memiliki kualitas yang baik serta kuantitas yang memadai.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah instansi pengawas internal pemerintah yang bertindak sebagai unsur pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahannya. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, menurut "Program Kerja Pengawasan Tahunan" (PKPT), pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dibagi menjadi audit, pengawasan, monitoring, review dan evaluasi. Prosedur terdiri dari pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan meliputi bidang dari sisi kebijakan, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, dan komoditas daerah. Jika ada pengaduan atau laporan dari masyarakat, atau permintaan bantuan audit dari pihak luar, pemeriksaan khusus juga akan dilakukan. Selanjutnya, terdapat audit untuk tujuan khusus seperti audit barang dan jasa, serta evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pengawasan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pelaksanaannya masih belum optimal, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Kekurangan tenaga ahli auditor, terdapat informasi bahwa hanya ada 6 orang tenaga ahli auditor yang dimiliki oleh inspektorat sedangkan dengan perhitungan kebutuhan dan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) seharusnya inspektorat daerah harus memiliki 15 sampai 25 orang tenaga ahli auditor. Keseluruhannya pegawai inspektorat berjumlah 36 orang. Selanjutnya, kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masih belum maksimal, karena masih terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan, atau tingkat pendidikan akhir pegawai tersebut belum sesuai dengan beban kerja ataupun jabatan yang diemban. . Hal lain yang menjadi permasalahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang masih kurang, termasuk kurangnya jumlah komputer yang ada di inspektorat. Jumlah komputer yang tersedia hanya 17 komputer dan 2 rusak, sehingga hanya ada 15 komputer yang dapat beroperasi sedangkan yang dipadukan sebanyak 36 komputer sejumlah pegawai yang ada. Selanjutnya luasnya objek yang dipertiksa yang mengakibatkan tingginya beban kerja yang dimiliki oleh inspektorat yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki saat ini, hal tersebut terbukti dari perhitungan jumlah beban kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana dengan jumlah beban kerja tersebut , dan melihat kondisi SDM Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini tentunya masih sangat kurang

Mengikuti uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat masalah terkait kinerja pengawasan yang dilakukan oleh instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan judul “kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara “.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penulis melakukan penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks kinerja inspektorat dalam fungsi pengawasan pemerintahan. Penelitian Kristian Lirit yang berjudul “kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan”(Kristian Lirit,2016), menemukan bahwa kinerja aparat pengawas intern inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terutama dalam aspek sarana prasarana sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum serta ketentuan yang berlaku. Sementara terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja aparat pengawas inspektorat, yaitu keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, tugas pengawasan yang cukup luas dan kompleks. Bambang Pristiyanto.dkk 2020, dalam penelitiannya menemukan bahwa kinerja aparat inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari seluruh sub bagian telah melaksanakan tugas pokok sesuai standar operasional dan setiap kasus dapat terselesaikan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti kompetensi aparat kurang merata, kurangnya anggaran dan pemberkasan SKPD yang lama. Selanjutnya Mangolo, dkk 2019 dalam penelitiannya menemukan bahwa kinerja dari Inspektorat Kota Manado belum optimal, dikarenakan masih ada hasil kerja yang ditargetkan belum semua tercapai, masih ada yang tidak memenuhi target. Kemudian hasil kerja dalam hal ini dapat disimpulkan belum optimal karena keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran dan keterbatasan waktu pemeriksaan.

Penelitian Djawaria Bariso 2015, menemukan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, belum sepenuhnya optimal dari tiga indikator yaitu, inputs, outputs, dan outcomes. Hasil penelitian menemukan adanya ketidak seimbangan jumlah obyek pengawasan (SKPD) dan ruang lingkup tugas dengan ketersediaan auditor. Sumber daya aparat auditor sebagai inputs yang tersedia sebanyak 26 orang, mengaudit 48 SKPD dan institusi terkait di tingkat Provinsi, serta SKPD-SKPD yang terdapat 55 SKPD di 11 kabupaten/kota. Kondisi itu

menyebabkan kemampuan organisasi menjadi kurang optimal meningkatkan kualitas sumber daya pengawasan, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, mendorong pemberantasan praktik praktik KKN, dan terutama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Amini dan Nina Widiowati 2016 bahwa Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih kurang optimal. Hal ini dapat terlihat dari dimensi dimensi yang di gunakan oleh peneliti untuk mengetahui kinerja inspektorat, terdapat empat dimensi yang sudah berjalan optimal yaitu kualitas, kuantitas, timeliness (ketepatan waktu), dan akuntabilitas, tetapi terdapat satu dimensi yaitu *cost effectiveness* (keefektifan biaya) yang masih belum optimal karena masih di temukannya permasalahan dan kendala yang dihadapi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa konteks yang berbeda, seperti lokus penelitian penulis yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya indikator yang penulis gunakan berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni penulis menggunakan pendapat dari Wibowo (2014), yang menyatakan bahwa kinerja atau *performance* merupakan hasil kerja , yang dapat diukur dari produktifitas, kualitas, ketepatan waktu, *cycle time*, dan pemanfaatan sumber daya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh deskripsi yang jelas mengenai kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara

II. KAJIAN TEORITIS

Kata kinerja sering dikaitkan dengan hasil akhir dari suatu pekerjaan seseorang atau organisasi. Hasil akhir tersebut merupakan target yang akan dicapai yang sebelumnya telah direncanakan. Setiap organisasi memiliki target masing-masing yang tertera dalam visi misi organisasi. Visi misi organisasi yang jelas akan

memunculkan kondisi siklus organisasi yang harmonis dan menghasilkan pencapaian organisasi yang sesuai target.. Menurut Wibowo (2014:7), kinerja berasal dari gagasan pelaksanaan, lebih spesifiknya karena pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan. kinerja terkait dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai. Sementara itu Fahmi (2018:2) menegaskan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat dapat mencetak laba ataupun tidak dapat mencetak laba yang dihasilkan dalam satu periode waktu merupakan suatu kinerja.

Lebih lanjut Wibowo (2014:159-161) dalam mengukur suatu kinerja menggunakan banyak faktor, diantaranya:

1. Produktivitas, yaitu hubungan antara input dan output fisik suatu proses. Untuk itu, produktivitas merupakan hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam memproduksi output. Misalnya output sebanyak 55 unit diproduksi oleh kelompok yang terdiri dari empat orang dalam waktu seminggu.
2. Kualitas, yaitu baik buruknya ukuran internal seperti, susut, jumlah ditolak, dan cacat perunit, maupun eksternal *rating* seperti kepuasan akan profesionalitas pegawai dalam melakukan tugasnya.
3. Ketepatan waktu, menyangkut persentase pengiriman tepat waktu atau sesuai dengan perjanjian. Pada dasarnya, ukuran ketepatan waktu adalah mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan.
4. *Cycle Time*, pengukuran *cycle time* mengukur berapa lama sesuatu dilakukan. Misalnya adalah berapa rata-rata waktu yang diperlukan dari penyampaian pesanan oleh pelanggan sampai pelanggan benar-benar menerima pesanan.
5. Pemanfaatan Sumber Daya, yaitu pengukuran terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada untuk di pergunakan. Pemanfaatan sumber daya dapat di terapkan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti computer, alat transportasi ataupun manusia
6. Biaya, yaitu untuk mengukur kalkulasi biaya dalam dasar per unit, namun pada umumnya banyak perusahaan atau organisasi yang hanya mempunyai sedikit informasi terkait biaya per unit hal tersebut karena kalkulasi biaya dilakukan secara menyeluruh.

Beragamnya faktor ukuran kinerja di atas menunjukkan bahwa adanya fleksibilitas ukuran kinerja dalam penggunaanya, tentunya perusahaan atau

organisasi dapat memilih faktor-faktor ukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi.

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, Pabundu (2010:3). Lebih lanjut Robbins dalam Sobirin (2009:5) berpendapat bahwa organisasi adalah unit sosial yang dengan sengaja diselesaikan untuk jangka waktu yang cukup lama, terdiri dari setidaknya dua individu yang bekerja sama dan terdiri, memiliki desain kerja terorganisir tertentu, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok orang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian organisasi menurut beberapa ahli diatas penulis mengangkat salah satu organisasi pemerintahan yaitu inspektorat. Inspektorat merupakan salah satu bagian dari organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pertanggungjawabannya kepada daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pengawasan sangat penting artinya karena akan memberikan *feedback* bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan, agar tidak menyimpang dari jalur dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi pelaksana, pengawasan merupakan kegiatan yang memberikan kontribusi pada proses pembangunan, sehingga kegiatan manajemen mampu secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Pengawasan juga berperan dalam memberikan penilaian dan nasihat tentang tata kelola pemerintahan. Menurut M.Manullang dalam Suriansyah Murhaini (2014:3) pengawasan merupakan interaksi untuk mencari tahu pekerjaan apa yang telah dilakukan, menilai dan membetulkan bila perlu dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

III. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Dimana Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan

untuk meneliti suatu objek alamiah yang dimana peneliti sebagai alat atau kunci. Analisa terhadap data bersifat induktif yang artinya penelitian kualitatif lebih fokus terhadap permasalahan, Sugiyono (2016:1). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat tahap yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mencoba membuat perbandingan kesesuaian teori dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan, dengan menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Teori kinerja yang dikemukakan oleh Wibowo merupakan indikator yang dijadikan penulisi dalam menganalisis kesesuaian antara teori dengan hasil penelitian penulis di lapangan. Hasil analisis tersebut adalah:

4.1 Produktivitas

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis produktivitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan sudah cukup baik , hal itu ditunjukkan dari setiap pegawai sudah mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat tersebut dapat berjalan. Namun, apabila dilihat dari jumlah kegiatan pengawasan serta objek yang diawasi oleh inspektorat, penulis menemukan bahwa jumlah aparatur yang dimiliki oleh inspektorat masih sangat kurang

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mencoba untuk mencari tahu besar beban kerja yang dimiliki oleh inspektorat , sehingga akan ditemukan jumlah sumberdaya manusia yang dibutuhkan oleh inspektorat yang sesuai dengan beban kerja tersebut

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja tersebut Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada Kelompok C3 dengan 4 Gugus Tugas , artinya Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan masih kekurangan jumlah pegawai yang dimana seharusnya memiliki 2 orang Auditor Ahli Utama.

4.2 Kualitas

Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulis menilai kualitas dari kinerja pengawasan terhadap pemerintahan yang dilakukan oleh inspektorat daerah menunjukkan kualitas yang baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasannya. Kualitas dalam hal ini tentunya sangat penting mengingat objek yang diawasi juga merupakan instansi-instansi pemerintahan.

Berdasarkan dari hasil dari beberapa wawancara , penulis menemukan bahwa respon yang ditunjukkan objek yang diawasi terhadap inspektorat cukup baik dan berpendapat bahwa Inspektorat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pengawasan sudah menunjukkan kualitas yang baik dan sesuai dengan pedoman hukum.

Walaupun demikian penulis masih menemukan beberapa kekurangan terkait dengan kualitas inspektorat dalam melakukan pengawasan, tak terkecuali dari kualitas aparatur inspektorat itu sendiri. Dari 34 pegawai yang berlatar pendidikan sarjana ,hanya terdapat dua pegawai yang berlatar pendidikan teknik sipil, sementara tidak terdapat pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi , mengingat dalam proses pemeriksaan yang kita lakukan itu berkaitan dengan bangunan dan perhitungan asset.

4.3 Ketepatan Waktu

Mengenai penggunaan waktu sebagaimana para pegawai pada umumnya telah melaksanakan sesuai dengan standar yang telah diatur dalam regulasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis baik itu terhadap pihak internal mau eksternal atau objek pengawasan dapat disimpulkan bahwa inspektorat dalam melakukan pengawasannya sudah tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Adapun hasil wawancara tersebut didukung dengan data indikator sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana dua dari tiga indikator sudah menunjukkan capaian 100% dan selanjutnya berada pada kisaran 87%-96%. Dari hal ini penulis menemukan bahwa Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan

telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

4.4 Cycle Time

Proses pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terdiri dari beberapa tahap yaitu tahapan perencanaan pengawasan, tahapan pelaksanaan pengawasan, tahapan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara penulis rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam pengawasan dalam menyusun laporan setelah terbitnya surat perintah tugas ialah selama 60 hari. Kemudian hasil laporan pengawasan tersebut di sampaikan kepada Irjen Departemen Dalam Negeri, BPK Provinsi Sumatera Utara, BPKP perwakilan Sumatera Utara, inspektorat provinsi Sumatera Utara dan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya di dalam setiap tahapan proses pengawasan , Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mampu mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan disetiap objek yang diawasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

4.5 Pemanfaatan Sumber Daya

Selama magang dan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan sumber daya yang dimiliki inspektorat khususnya mengenai sarana dan prasarana beberapa sudah memenuhi, akan tetapi masih teradat keuangan. Hal tersebut terbukti selama penulis melaksanakan magang masih banyak pegawai yang menggunakan komputer/laptop pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini laptop pribadi setiap pegawai tentunya berbeda -beda ada yang sesuai dengan standar ada yang tidak. Sementara jumlah computer yang ada di kantor masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada.

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa pemanfaatan sumber daya yang berkaitan sarana dan prasarana masih terdapat beberapa kekurangan seperti jumlah komputer yang seharusnya harus sesuai dengan jumlah pegawai

yang membutuhkan. kemudian alat pemeriksa fisik yang membantu para auditor untuk menghitung kadar zat dari objek yang akan diperiksa.

4.6 Faktor=faktor yang menghambat kinerja Inspektorat

Adapun faktor-faktor yang menghambat kinerja Inspektorat yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang pendidikan tehnik sipil dan akuntans tidak tersedia, sementara banyak pemeriksaan dilapangan yang menyangkut bangunan dan permasalahan pembukuan keuangan dan perhitungan aset.
2. Keterampilan sumber daya manusia (SDM) pengawas masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam informasi teknologi perlu dimaksimalkan.
3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana.Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, hal ini menyulitkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.
4. SDM Fungsional Auditor Ahli Utama masih belum ada ,seharusnya jika dibandingkan dengan Inspektorat daerah Kabupaten Tapanuli yang berada pada kelompok C3 dengan GT4 seharusnya harus terdapat 2 orang Fungsional Auditor Ahli Utama sehingga kegiatan pengawasan dapat terlaksana secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
5. Dibandingkan dengan sumber daya manusia (SDM), serta ketersediaan sarana dan prasarana yang ada, luasnya ruang lingkup tugas pokok dan ruang lingkup fungsi pengawasan menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, pembinaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat

4.7 Upaya Inspektorat dalam meningkatkan kinerja

Adapun upaya Inspektorat untuk meningkatkan kinerja, yaitu:

1. Diusulkannya penambahan auditor yang handal dan profesional, sehingga keluaran akhir akan memberikan laporan yang praktis dan bertanggung jawab, serta dapat menyeimbangkan jumlah objek audit yang ada dengan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Mengajak sumber daya manusia inspektorat untuk berpartisipasi dalam pelatihan.
3. Memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat.
4. Menentukan arah rencana pemantauan melalui koordinasi berkelanjutan antara APIP dan BPK

4.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja inspektorat daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemerintahan merupakan suatu kegiatan pemerinyahan yang sangat penting terhadap jalannya kegiatan pemerintahan. Kegiatan pengawasan oleh inspektorat tersebut bertujuan agar kegiatan pemerintahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian penulis terkait Kinerja Inspektorat Daerah dalam Fungsi Pengawas Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, penelusi menemukan bahwa Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan atau faktor penghambat yang dapat berpengaruh terhadap kinerja inspektorat. Sebagaimana dengan hasil peneltian Lirit Kristian, 2016 bahwa di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan masih kekurangan jumlah sumber daya manusi (SDM) yang merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Sebagaimana penelitian Bambang Pristiyanto dkk 2020, bahwa Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan tugasnya dengan optimal, akan tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti kualitas kompetensi aparatur yang masih kurang merata, untuk itu sangat diperlukannya peningkatan kompetensi baik atas kesadaran SDMnya sendiri maupun pemerintah daerah.

Terciptanya Kinerja Inspektorat yang baik tentunya akan berdapampak baik terhadap kegiatan pemerintahan. Salah satu dampat baiknya ialah apabila kinerja inspektorat baik maka kinerja dari pemerintahan juga akan baik atau berbanding lurus. Dengan demikian sebagaimana dengan penelitian Bambang Pristiyanto.dkk 2020, bahwa perlu adanya beberapa Tindakan yang dapat meningkatkan kinerja inspektorat, antara lain, terkait kualitas sumber daya aparatur, alangkah baiknya dilakukan seleksi yang lebih ketat dalam penerimaan sebagai aparatur inspektorat daerah, inspektorat daerah menambah kapasitas pendidikan dan pelatihan kepegawaian bagi aparatur, dan Inspektorat Daerah meminta kepada SKPD SKPD yang bersangkutan untuk berkomitmen dalam melaksanakan tugas pemerintahan bersama. Penyediaan berkas yang sesegera mungkin dalam artian adanya komunikasi antarv instansi.

V. KESIMPULAN

Kinerja pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Derah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lingkungan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah berjalan dengan baik. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan inspektorat juga berusaha melakukan pengawasan agar dapat melakukannya secara tepat dan selalu berusaha

saling berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemukan. inspektorat juga menindaklanjuti dengan baik hasil pengawasan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Walaupun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu ditingkatkan.

Faktor penghambat atau kekurangan yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap teknologi informasi, jumlah objek pemeriksaan yang luas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki

Upaya yang dilakukan oleh nspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut antara lain, diusulkannya penambahan auditor yang handal dan professional, mengajak sumber daya manusia inspektorat untuk berpartisipasi dalam pelatihan, memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat, serta menentukan arah rencana pemantauan melalui koordinasi berkelanjutan antara APIP dan BPK

VI. SARAN

Adaoun berdasarkan simpulan di atas, saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Mengingat banyaknya objek pemeriksaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan segera menambah jumlah auditor dengan keahlian / kapabilitas sesuai kebutuhan, sehingga dengan tersedianya auditor yang berkualitas maka kegiatan pengawasan yang dilakukan akan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah kabupaten Tapanuli Selatan
2. Inspektorat sebaiknya memberikan informasi terbaru tentang pelatihan sehingga informasi tersebut dapat diketahui oleh Sumber Daya Manusia Inspektorat secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selain melakukan pengadaan tambahan, perawatan dan peremajaan juga sangat diperlukan terhadap saran dan prasarana.

VII. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

DAFTAR PUSTAKAN

A. Buku-buku

- Amini, dan Widowati, Nina. 2016. Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*. 1-22
- Bariso, Djawaria. 2015. Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*. 3(3). 25-38
- Fahmi, Irham. 2018. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Lirit, Kristian, 2016 . Kinerja Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 5(1). 42
- Mangolo, Endra, Gosal, Ronny dan Singkoh, Frans. 2019. Kinerja Inspektorat Kota Manado dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 18(3). 1-10
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Psristiyanto, Bambang, Afiffudini, dan Suyeno. 2020. Analisis Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi. *Jurnal Respon Publik*. 14(2). 87-99
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tika, Moh Pabundu. 2010. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Urian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

C. Sumber Lain

Data Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020

Data Kepegawaian dan Peta Jabatan Tahun 2020

Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 2021

PKPT Berbasis Resiko Tahun 2020

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2016-2021